

DAFTAR PUSTAKA

- Arsens, et al. 2008. *Auditing & Jasa Assurance*, Jakarta: Erlangga
- Giligan dan Matsusaka. 2001. *Legislature size is a perennial interest of policy makers*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.Semarang: UNDIP.
- Halim, 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta.
- Heriningsih, dan Ruserlistyani.2013.*Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 13, Nomor 02.UPN Yogyakarta.
- Hilmi, dan Martani.2012.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.*E-Jurnal Akuntansi*.Universitas Indonesia.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky,2011. Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal, Universitas Riau
- Indrianto, dan Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Khasanah. 2014. *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SKRIPSI. UNDIP.
- Liestiani, Annisa. 2008. Disclosure In Local Government Financial Statements: The Case of Indonesia. *Global Review of Accounting And Financial*, Vol. 3No.1 March 2012. 67-84
- Marfiana, dan Kurniasih. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Kajian Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret. ISSN: 1979-4886.
- Muqorobin. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. SKRIPSI.Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas laporan Keuangan Dan Implikasinay Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 1, Nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
- Patrick, P. A.2007. *The Determination of Organizational Inovativeness: The Adotion of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvanica: The Pennsylvanica State University
- Poerwadarminta,W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis full akrual.
- Setiawan, Wahyu.2012. *pengaruh akuntabilitas Laporan keuangan pemeerintahan daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah daerah Di Indonesia*. Skripsi , Jurusan Akuntansi Univerista Diponegoro : Semarang
- Setyaningrum, dan Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Volume 9, Nomor 2. Universitas Indonesia.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, Alfabeta.Bandung.
- Suhardjanto, dan Yulianingtyas. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah TerhadapKepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, Volume 8, Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sumarjo, Hendro.2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suharjanto, Djoko dan Lesmana, Indra Sigit. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Wajib*
- Waliiyani, Ghaniyyu Mintotik dan Mahmud, Amir.2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Di Indonesia*
- Wolk et. al. 2001. *Accounting Theory: A Conceptional Institusional Approach*, Fifth Edition.South-Western College Publishing
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah kas menuju akrual.

Virgasari, Aviva.2009. Hubungan antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umu dengan kinerja Keuangan Daerah.Skripsi Universitas Brawijaya Malang.